EFEKTIVITAS E-SAKIP DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN SUMBA TENGAH

Deddy Zakarias Armando Ballu
NPP. 32.0644
Asdaf Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan
Email: 32.0644@praja.ipdn.ac.id
Pembimbing Skripsi: Ardieansyah, S.STP, M.Soc, Sc

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP)*: The implementation of E-SAKIP (Electronic-Based Government Institution Performance Accountability System) is a strategic step toward realizing effective, efficient, and accountable governance in the era of digital transformation. In Sumba Tengah Regency, the implementation of E-SAKIP still faces various challenges, such as limited technological infrastructure, low human resource competence, system instability, and suboptimal inter-agency coordination. These issues have impacted budget absorption rates (averaging 75%) and delays in performance reporting (averaging 15 days).* ***Purpose****: This study aims to evaluate the effectiveness of E-SAKIP implementation in improving the accountability of local government administration in Sumba Tengah Regency.* ***Method****: This research uses a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation.* ***Results****: The findings show that the implementation of E-SAKIP has contributed to an increase in SAKIP scores for Sumba Tengah Regency, from 52.45 in 2020 to 60.12 in 2023. The effectiveness of E-SAKIP implementation is influenced by limitations in technological infrastructure—such as internet access gaps in 8 out of 12 sub-districts—as well as the capacity of human resources, with only 45% of operators possessing adequate skills, and minimal technical support.* ***Conclusion****: Although the SAKIP score in Sumba Tengah Regency has shown improvement, further enhancements are necessary to achieve better outcomes. These include upgrading internet infrastructure, improving staff competencies through training, developing standardized reporting procedures, and implementing structured system maintenance in order to optimize the utilization of E-SAKIP for better government accountability.*

Keywords: *E-SAKIP, Effectiveness, Information System*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Implementasi E-SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis elektronik) merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel di era transformasi digital. Di Kabupaten Sumba Tengah, implementasi E-SAKIP masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, minimnya kompetensi SDM, ketidakstabilan sistem, dan belum optimalnya koordinasi antar OPD yang berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran (rata-rata 75%) dan keterlambatan pelaporan kinerja (rata-rata 15 hari). **Tujuan**: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi E-SAKIP dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Sumba Tengah. **Metode**: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. **Hasil**: Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 6 indikator yang digunakan dalam penelitian ini belum ada yang menunjukkan hasil yang sesuai. Ditemukan bebrapa hambatan dalam penelitian ini seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dengan kesenjangan jaringan internet di 8 dari 12 kecamatan, kapabilitas SDM dengan hanya 45% operator memiliki keterampilan memadai, serta minimnya dukungan teknis.

Kesimpulan: Efektivitas implementasi E-SAKIP dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Sumba Tengah belum dinilai terlalu baik. Meskipun nilai SAKIP Kabupaten Sumba Tengah menunjukkan hasil yang meningkat. tapi, masih perlu perbaikan agar nilai SAKIP yang didapatkan bisa meningkat. Untuk itu diperlukannya peningkatan infrastruktur jaringan, pengembangan kompetensi staf melalui pelatihan, penyusunan prosedur pelaporan yang standar, dan penerapan pemeliharaan sistem terstruktur untuk mengoptimalkan pemanfaatan E-SAKIP bagi akuntabilitas pemerintahan daerah yang lebih baik.
Kata Kunci: E-SAKIP, Efektivitas, Sistem Informasi

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa dampak signifikan terhadap dinamika pemerintahan modern (Jacob et al:2025). Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan merupakan suatu keniscayaan di era Revolusi Industri 5.0. Pergeseran dari sistem administrasi berbasis kertas menuju sistem elektronik telah menjadi strategi global dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Menurut Indrajit (2022), e-government bukan hanya mengotomatisasi proses administratif, melainkan juga merevolusi hubungan antara pemerintah dan para pemangku kepentingan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dalam konteks Indonesia, upaya transformasi ini diformalkan melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang terbuka, bertanggung jawab, dan mampu memberikan layanan publik berkualitas. Digitalisasi mengubah cara organisasi beroperasi dan cara karyawan memandang pekerjaan mereka. Negara dan staf administratifnya tidak terkecuali, karena kemampuan ini penting untuk melakukan tugas operasional yang mendukung proses dokumentasi lembaga publik (Inga-avila., et al:2025).

Salah satu bentuk implementasi SPBE adalah penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis elektronik (E-SAKIP), yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui pelaporan kinerja yang sistematis dan terintegrasi dengan teknologi informasi. Sejak diluncurkan oleh Kementerian PAN-RB pada tahun 2015, E-SAKIP menjadi instrumen penting dalam mendorong reformasi birokrasi dan efisiensi anggaran. Di tingkat nasional, penerapan E-SAKIP menunjukkan tren positif, dengan peningkatan rata-rata nilai SAKIP dari tahun ke tahun. Namun demikian, implementasi di tingkat daerah belum merata.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), capaian nilai SAKIP masih bervariasi, di mana sebagian besar kabupaten/kota masih berada pada kategori CC dan C. Kabupaten Sumba Tengah sebagai salah satu daerah otonom di NTT telah mengadopsi E-SAKIP sejak tahun 2016 dan mulai menunjukkan peningkatan nilai akuntabilitas kinerja, yakni dari kategori CC menjadi B pada tahun 2023. Meskipun demikian, efektivitas implementasi sistem ini masih menghadapi berbagai hambatan. Hal ini menunjukkan adanya penurunan partisipasi dalam pengembangan kompetensi yang dapat berdampak pada rendahnya kinerja dan kualitas layanan publik (Eaton et al: 2022).

Permasalahan utama yang muncul antara lain rendahnya integrasi antara dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, keterbatasan infrastruktur jaringan, rendahnya kompetensi aparatur dalam mengoperasikan sistem, serta lemahnya budaya kinerja dan kualitas data. Selain itu, hasil evaluasi menunjukkan bahwa banyak laporan kinerja masih harus dimodifikasi secara manual dan tingkat efisiensi anggaran belum mencapai target ideal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa E-SAKIP belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Berdasarkan fenomena tersebut, perlu dilakukan kajian mendalam untuk mengukur

sejauh mana efektivitas penerapan E-SAKIP dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Sumba Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi E-SAKIP, baik dari sisi perencanaan, pengukuran, pelaporan, maupun evaluasi kinerja instansi pemerintah.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis elektronik (E-SAKIP) sejatinya ditujukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks nasional, penerapan E-SAKIP telah menunjukkan perkembangan positif, yang tercermin dari meningkatnya rata-rata nilai akuntabilitas kinerja di berbagai instansi pemerintah. Bahkan, sebagian besar daerah di Indonesia telah menunjukkan perbaikan signifikan dalam sistem pelaporan kinerja yang terintegrasi dengan perencanaan strategis dan pengelolaan anggaran.

Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya tercermin di Kabupaten Sumba Tengah. Meskipun secara formal telah mengadopsi E-SAKIP sejak tahun 2016 dan memperkuatnya dengan regulasi lokal seperti Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 20 Tahun 2023, implementasinya masih menghadapi sejumlah hambatan fundamental. Nilai akuntabilitas kinerja yang baru meningkat ke kategori "B" pada tahun 2023 menjadi salah satu indikator bahwa efektivitas sistem ini belum optimal. Kesenjangan antara perencanaan strategis dengan pelaporan kinerja masih tinggi, yang menunjukkan belum terintegrasinya proses manajemen kinerja secara menyeluruh.

Lebih jauh, dari sisi teknis dan sumber daya, berbagai permasalahan turut memperlebar kesenjangan antara harapan dan realitas implementasi E-SAKIP di daerah ini. Rendahnya kompetensi SDM, terbatasnya infrastruktur jaringan internet di sebagian besar kecamatan, serta ketergantungan pada proses manual dalam pelaporan kinerja menunjukkan bahwa digitalisasi tata kelola belum berjalan secara ideal. Tingginya tingkat kesalahan input data, seringnya sistem mengalami downtime, serta terbatasnya tenaga teknis pendukung semakin memperburuk efektivitas implementasi E-SAKIP.

Permasalahan tersebut berdampak langsung pada rendahnya efisiensi anggaran, keterlambatan pelaporan, serta kurang optimalnya pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Selain itu, indeks kepuasan masyarakat terhadap transparansi kinerja pemerintah masih berada pada angka yang cukup rendah. Kesenjangan ini semakin diperkuat dengan temuan bahwa 42% dari laporan kinerja masih memerlukan penyesuaian manual sebelum dikirim ke Kemenpan-RB akibat ketidaksesuaian format, yang seharusnya telah dapat dihindari melalui pemanfaatan sistem berbasis elektronik yang matang dan terstandarisasi.

Dengan demikian, terdapat perbedaan nyata antara tujuan normatif dari penerapan E-SAKIP sebagai instrumen penguatan akuntabilitas pemerintahan, dengan kondisi empiris yang dihadapi oleh Kabupaten Sumba Tengah. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar utama dilakukannya penelitian ini, guna mengkaji secara lebih mendalam sejauh mana efektivitas E-SAKIP di Kabupaten Sumba Tengah, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang perlu ditangani untuk mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks SAKIP dalam pelayanan pemerintahan.

Penelitian Pertama oleh Dwi Agus Setiawan dan Oktaviola Reviandani (2024) berjudul "Efektivitas E-SAKIP dalam Meningkatkan Akuntabilitas DPMPTSP Kota Surabaya". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif implementasi sistem E-SAKIP dalam mendukung akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-SAKIP cukup efektif karena telah memenuhi beberapa indikator utama dalam pelaporan kinerja, seperti

perencanaan kinerja yang terukur, pelaporan secara daring, dan peningkatan transparansi publik. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal penguatan SDM dan pemanfaatan teknologi yang belum merata.

Penelitian Kedua oleh Nadia Fitri Rizka Sofyan (2025) berjudul "Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Meningkatkan Kinerja dan Skor SAKIP di Sekretariat Jenderal DPD RI". Penelitian ini menyoroti bagaimana SAKIP berperan dalam mendorong peningkatan kinerja birokrasi dan akuntabilitas lembaga negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Sekretariat Jenderal DPD RI. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi SAKIP berdampak positif terhadap perencanaan kinerja, pelaporan, serta capaian indikator kinerja, yang tercermin dari meningkatnya skor evaluasi SAKIP. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam konsistensi monitoring dan evaluasi.

Penelitian Ketiga oleh Andi Muh. Monalisa, Muhlis Madani, dan Nasrullah Tahir (2022) berjudul "Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo". Penelitian ini membahas penerapan SAKIP dalam mendorong budaya kinerja dan akuntabilitas di lingkup pemerintah daerah. Hasil studi menunjukkan bahwa sistem SAKIP memberikan dampak positif dalam mendokumentasikan kinerja dan pertanggungjawaban anggaran, serta menjadi instrumen evaluatif yang meningkatkan kualitas manajemen kinerja. Namun demikian, masih diperlukan penguatan dalam aspek koordinasi dan integrasi lintas perangkat daerah.

Penelitian Keempat oleh Ummur Rahma (2023) berjudul "Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh". Dalam skripsi ini, peneliti menyoroti bagaimana penerapan SAKIP di instansi pemerintahan Aceh berperan dalam meningkatkan transparansi dan tanggung jawab atas pelaksanaan program kerja. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem SAKIP telah mendorong instansi pemerintah menjadi lebih terukur dalam penyusunan target dan capaian. Meski demikian, terdapat kekurangan dalam hal penguasaan teknis oleh beberapa ASN dan keterbatasan pelatihan yang diberikan.

Penelitian Kelima oleh Paulus Nandi Stefan, Jantje Jimmy Tinangon, dan Dedy Afandi (2023) berjudul "Analisis Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur". Penelitian ini mengevaluasi penerapan SAKIP di daerah timur Indonesia yang masih menghadapi keterbatasan SDM dan infrastruktur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kendati SAKIP telah diimplementasikan, efektivitasnya masih belum optimal karena lemahnya komitmen pimpinan daerah dan rendahnya partisipasi dalam evaluasi kinerja. Penelitian ini menyarankan adanya peningkatan pelatihan teknis serta pemantauan berkala dari pemerintah provinsi maupun pusat.

1.4 Pernyataan Kebaruan Karya Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) yang terletak pada fokus analisis terhadap efektivitas implementasi E-SAKIP secara mendalam di Kabupaten Sumba Tengah, sebuah daerah tertinggal di wilayah timur Indonesia yang menghadapi tantangan infrastruktur, kompetensi SDM, dan ketimpangan akses teknologi. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung membahas SAKIP dalam konteks administratif atau teknis secara umum, penelitian ini menggunakan model Delone & McLean untuk menganalisis secara sistematis enam dimensi efektivitas sistem informasi: kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih.

Bila dibandingkan dengan penelitian Setiawan dan Reviandani (2024) yang fokus pada implementasi E-SAKIP di DPMPTSP Surabaya, penelitian ini lebih kaya secara konteks karena menyentuh keterbatasan lokal seperti downtime sistem, ketidaksesuaian format pelaporan, dan rendahnya digital literacy yang tidak banyak dikaji di kota besar.

Sofyan (2025) meneliti implementasi SAKIP di Sekretariat Jenderal DPD RI dengan pendekatan kinerja administratif lembaga pusat, sementara penelitian ini menyelami permasalahan teknis dan kultural di tingkat daerah, khususnya di kabupaten dengan nilai SAKIP

yang sebelumnya rendah (kategori CC), sehingga memberikan insight baru terkait implementasi SAKIP di daerah dengan kapasitas terbatas.

Monalisa et al. (2022) membahas efektivitas SAKIP di Kabupaten Wajo dengan pendekatan manajemen kinerja, namun belum mengintegrasikan pendekatan sistem informasi berbasis model evaluasi efektivitas seperti yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan mengadopsi framework Delone & McLean, penelitian ini menawarkan sudut pandang evaluasi sistem yang lebih terstruktur dan komprehensif.

Rahma (2023) meneliti SAKIP di Aceh secara deskriptif mengenai kontribusinya dalam mendukung transparansi. Penelitian ini melangkah lebih jauh dengan mengukur tingkat penggunaan sistem, frekuensi error, ketepatan waktu pelaporan, hingga indikator user satisfaction dan net benefit, sesuatu yang tidak dijangkau oleh penelitian Rahma.

Sementara itu, Stefan et al. (2023) meneliti implementasi SAKIP di Manggarai Timur, juga di wilayah NTT, namun dengan fokus pada struktur birokrasi dan hambatan administratif umum. Penelitian ini memberikan pembaruan dengan data primer yang lebih rinci, seperti tingkat kesalahan input data (25%), keterlambatan pelaporan (15 hari), dan downtime sistem (4 jam/minggu), serta analisis faktor-faktor penghambat seperti kurangnya dukungan teknis dan ketidaksesuaian antara sistem dan kebutuhan OPD.

Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan penelitian pada konteks implementasi E-SAKIP di daerah dengan keterbatasan kapasitas seperti Kabupaten Sumba Tengah. Selain itu, kontribusi teoritisnya adalah penggunaan model Delone & McLean untuk mengevaluasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, yang sebelumnya belum banyak diterapkan pada studi-studi serupa di tingkat daerah. Hasil dari penelitian ini tidak hanya penting bagi penguatan SAKIP di Sumba Tengah, tetapi juga dapat menjadi rujukan kebijakan untuk kabupaten-kabupaten lain dengan karakteristik serupa di Indonesia bagian timur.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui efektivitas implementasi E-SAKIP dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Sumba Tengah dengan menggunakan teori Delone & Mclean. Serta Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi E-SAKIP serta merumuskan solusi strategis dengan menggunakan teori Delone & Mclean.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2018:41), pendekatan kualitatif merupakan jenis pendekatan yang dilakukan dengan cara mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan. Metode ini mencakup berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena sosial dengan cara yang lebih holistik.

Pemilihan metode kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada tujuan untuk memahami secara mendalam tentang efektivitas implementasi E-SAKIP dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Sumba Tengah dengan menggunakan teori Delone & Mclean. Masalah ini bersifat kontekstual dan kompleks sehingga tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui data kuantitatif. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif menjadi relevan karena dapat menangkap makna, persepsi, dan pengalaman subjek penelitian dalam konteks nyata.

Metode penelitian kualitatif yang digunakan berlandaskan filsafat postpositivisme, di mana penelitian dilakukan pada kondisi objek yang alami dengan peneliti sebagai instrumen utama. Dalam pelaksanaannya, peneliti menggabungkan beberapa sumber informasi melalui triangulasi, serta menganalisis data secara induktif, dengan fokus pada makna daripada generalisasi (Nurdin & Hartati, 2019:42). Pendekatan kualitatif juga memperhatikan aspek waktu dan berupaya mengumpulkan serta menginterpretasikan data melalui dokumentasi selama pelaksanaan

penelitian. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dari jurnal, transkrip, catatan lapangan, dan buku kode (Neuman, 2017:66). Penelitian ini menekankan pada kedalaman informasi yang diperoleh dan tidak semata-mata berfokus pada jumlah data.

Menurut Fatimah (2019), pendekatan kualitatif lebih cenderung digunakan untuk penelitian yang berkaitan dengan masalah sosial karena dalam penelitian kualitatif, makna dan pemahaman terhadap fenomena sosial lebih diutamakan. Dengan menerapkan metode ini, peneliti bertujuan untuk efektivitas implementasi E-SAKIP dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Sumba Tengah dengan menggunakan teori Delone & Mclean, berdasarkan pengalaman dan persepsi para informan.

Data yang dikumpulkan bersifat naratif dan mendalam, guna menangkap makna dan konteks sosial yang tidak dapat dijelaskan secara statistik. Dalam konteks penelitian pemerintahan, setiap studi kualitatif dapat memiliki desain yang bervariasi sesuai dengan dinamika dan sifat alami fenomena yang diteliti, yang dapat berubah seiring waktu (Simangungsong, 2017:190).

Peneliti mengumpulkan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sugiyono (2016:225) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dari sumber tertentu, antara lain melalui angket, wawancara, observasi, dokumentasi, dan lainnya. Penelitian ini menggunakan informan sebagai sumber informasi utama. Menurut Moleong (2015:163), informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini dilaksanakan selama 20 hari, yaitu dari tanggal 6 Januari 2025 hingga 25 Januari 2025, dan bertempat di Pemerintahan Kabupaten Sumba Tengah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Implementasi E-SAKIP Berdasarkan Model DeLone & McLean

1. Kualitas Sistem (System Quality)

Kualitas sistem merupakan komponen fundamental dalam keberhasilan implementasi sistem informasi pemerintahan seperti E-SAKIP (Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Dalam konteks ini, kualitas sistem mengacu pada kemampuan E-SAKIP untuk memenuhi kebutuhan operasional dan strategis para penggunanya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah. Sebuah sistem yang berkualitas tinggi idealnya mampu menyediakan antarmuka yang intuitif dan ramah pengguna, menawarkan stabilitas operasional yang konsisten, serta memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan berbagai kebutuhan dan perubahan organisasional. Sistem yang baik juga ditandai dengan responsivitas yang tinggi, mampu memproses data dengan cepat dan akurat, serta meminimalisir gangguan teknis yang dapat menghambat efektivitas kerja para aparatur sipil negara yang menggunakannya dalam kegiatan pelaporan dan administrasi sehari-hari.

a. Kemudahan Penggunaan

Kemudahan penggunaan menjadi aspek pertama yang dievaluasi dalam kualitas sistem E-SAKIP. Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 32 admin E-SAKIP di berbagai OPD, sebanyak 65% responden menyatakan bahwa sistem cukup mudah digunakan untuk fungsi-fungsi dasar, namun 35% lainnya merasa kesulitan dengan fitur-fitur yang lebih kompleks.

Dalam evaluasi kualitas sistem E-SAKIP, survei dilakukan terhadap 47 responden yang berasal dari berbagai instansi terkait. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas pengguna merasa sistem ini cukup stabil dan sangat membantu dalam penyusunan laporan kinerja. Namun, masih terdapat sejumlah kendala teknis yang cukup signifikan dan sering dialami oleh para pengguna. Salah satu masalah utama yang diidentifikasi adalah lambatnya waktu pemrosesan data, terutama pada jam kerja ketika banyak pengguna secara bersamaan menginput laporan. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam pengunggahan serta pembaruan data, sehingga pegawai harus menunggu lebih lama atau mencoba kembali beberapa kali sebelum sistem merespons. Kondisi ini menjadi kendala serius, terutama bagi pegawai yang bekerja dengan tenggat waktu

ketat dalam penyusunan laporan kinerja.

Aspek lain yang menjadi sorotan adalah tata letak menu dan navigasi yang dinilai kurang user-friendly. Sebanyak 58% responden menilai bahwa beberapa menu penting sulit ditemukan dan membutuhkan beberapa kali klik untuk mencapai halaman yang diinginkan. Dari segi desain antarmuka, meskipun fitur yang disediakan cukup lengkap, banyak responden menilai bahwa tata letak menu dalam sistem masih kurang intuitif. Beberapa menu dan navigasi dianggap membingungkan, sehingga pengguna membutuhkan waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri dengan sistem. Penyempurnaan antarmuka yang lebih user-friendly diperlukan agar sistem lebih mudah diakses dan digunakan, terutama bagi pegawai yang belum terlalu familiar dengan platform digital semacam ini.

b. Keandalan Sistem

Keandalan sistem menjadi tantangan utama dalam implementasi E-SAKIP di Kabupaten Sumba Tengah. Data observasi menunjukkan bahwa sistem mengalami downtime rata-rata 4 jam per minggu, terutama pada jam-jam sibuk. Sebanyak 72% responden melaporkan pernah mengalami kegagalan sistem saat sedang melakukan input atau penyimpanan data.

Selain itu, permasalahan lain yang sering dihadapi adalah error atau kegagalan sistem saat pengguna mengunggah laporan. Beberapa pegawai melaporkan bahwa sistem terkadang gagal menyimpan data yang telah diinput, sehingga mereka harus mengulang proses pengunggahan dari awal. Hal ini tidak hanya menghambat produktivitas tetapi juga meningkatkan risiko kehilangan data penting. Ketidakstabilan sistem dalam menangani dokumen yang diunggah menjadi tantangan yang perlu segera diatasi agar pengguna tidak mengalami kesulitan dalam proses administrasi laporan kinerja.

Salah satu permasalahan utama yang teridentifikasi adalah lambatnya waktu pemrosesan data, terutama pada jam-jam sibuk ketika banyak pengguna mengakses sistem secara simultan. Fenomena ini sangat terasa pada periode-periode krusial seperti akhir bulan atau menjelang tenggat waktu pelaporan triwulanan, ketika volume penginputan data meningkat secara signifikan. Kepadatan lalu lintas data ini mengakibatkan sistem mengalami penurunan performa yang substansial, yang ditandai dengan respons lambat terhadap perintah pengguna dan waktu loading halaman yang berkepanjangan. Akibatnya, banyak pegawai yang harus mengalokasikan waktu ekstra untuk menyelesaikan tugas-tugas pelaporan yang seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat, menimbulkan inefisiensi dalam alokasi sumber daya manusia di berbagai instansi pemerintahan.

Tantangan teknis berikutnya yang sering dihadapi oleh para pengguna E-SAKIP di Kabupaten Sumba Tengah adalah munculnya error yang tidak terprediksi ketika mengunggah atau menyimpan laporan kinerja. Banyak responden melaporkan pengalaman frustasi ketika sistem tiba-tiba gagal menyimpan data yang telah mereka input dengan teliti, menyebabkan hilangnya informasi penting dan mengharuskan mereka untuk mengulang proses penginputan dari awal. Kejadian semacam ini tidak hanya membuang waktu para pegawai, tetapi juga berpotensi menurunkan akurasi data yang dimasukkan akibat kelelahan yang disebabkan oleh pengulangan tugas yang sama. Lebih jauh lagi, ketidakpastian dalam proses penyimpanan data dapat menimbulkan keraguan di kalangan pengguna terhadap reliabilitas sistem secara keseluruhan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi tingkat adopsi E-SAKIP di berbagai instansi pemerintahan.

c. Keamanan

Aspek keamanan sistem E-SAKIP dinilai cukup baik oleh 80% responden. Sistem memiliki fitur keamanan standar seperti login dengan username dan password, serta pembagian hak akses berdasarkan peran pengguna (admin, operator, dan pimpinan).

Kendala lainnya yang dilaporkan adalah kurangnya kompatibilitas sistem dengan perangkat mobile. Dalam era digital saat ini, banyak pegawai berharap dapat mengakses E-SAKIP melalui perangkat seluler untuk memudahkan pekerjaan yang bersifat mobile atau mendesak. Namun, beberapa responden menyatakan bahwa tampilan sistem tidak optimal ketika

diakses melalui perangkat seluler, yang menyebabkan kesulitan dalam navigasi serta penginputan data. Hal ini membatasi fleksibilitas pengguna dalam bekerja, terutama bagi mereka yang sering berpindah tempat atau membutuhkan akses cepat terhadap sistem di luar

2. Kualitas Informasi (Information Quality)

Kualitas informasi dalam E-SAKIP merupakan aspek fundamental yang menentukan efektivitas sistem ini sebagai instrumen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kualitas informasi tidak hanya mencakup keakuratan data semata, tetapi juga meliputi dimensi kelengkapan, relevansi, dan kemutakhiran informasi yang disajikan. Sistem E-SAKIP yang ideal harus mampu menyediakan data yang terverifikasi, komprehensif, sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan, dan selalu diperbaharui secara berkala sehingga mencerminkan kondisi aktual di lapangan. Data yang disajikan haruslah valid, terstruktur, mudah dipahami, dan diperbarui secara berkala agar dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat. Dengan adanya informasi yang berkualitas, pejabat daerah dapat melakukan evaluasi kinerja dengan lebih efektif serta menyusun kebijakan berbasis data yang lebih akurat dan objektif.

a. Akurasi

Akurasi informasi yang dihasilkan oleh E-SAKIP menjadi perhatian utama bagi sebagian besar pengguna. Data menunjukkan bahwa tingkat kesalahan input data mencapai 25%, terutama disebabkan oleh inkonsistensi format pelaporan antar-OPD dan kurangnya validasi data otomatis dalam sistem. Dalam konteks pemerintahan daerah, kualitas informasi menjadi sangat krusial mengingat data yang tersedia digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan strategis oleh para pejabat daerah. Informasi yang disajikan harus terstruktur dengan baik, mudah diinterpretasikan, dan diorganisir secara sistematis untuk memfasilitasi analisis mendalam. Ketersediaan informasi berkualitas tinggi memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi kinerja yang obyektif, mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan, serta mengukur pencapaian program kerja secara akurat. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 47 responden pengguna E-SAKIP di Kabupaten Sumba Tengah, mayoritas memberikan penilaian positif terhadap akurasi dan kelengkapan informasi yang disediakan sistem. Para responden mengakui bahwa informasi dalam E-SAKIP telah membantu mereka dalam mengelola, memantau, dan mengevaluasi kinerja pemerintahan. Namun demikian, penelitian ini juga mengungkapkan beberapa tantangan signifikan terkait kualitas informasi yang masih dihadapi oleh para pengguna sistem.

b. Ketepatan Waktu

Aspek ketepatan waktu informasi menunjukkan adanya tantangan signifikan dengan keterlambatan update data berkisar antara 7-14 hari. Sebanyak 68% responden melaporkan bahwa informasi dalam sistem sering tidak mencerminkan kondisi terkini karena proses pembaruan data yang tidak real-time. Salah satu permasalahan utama yang teridentifikasi adalah kurangnya pembaruan data secara real-time. Banyak responden melaporkan bahwa informasi yang ditampilkan dalam sistem sering mengalami keterlambatan pembaruan, sehingga tidak selalu mencerminkan kondisi terkini di lapangan. Keterlambatan ini berdampak pada proses pengambilan keputusan, dimana pejabat daerah terpaksa menunda pertimbangan mereka hingga data terbaru tersedia. Contohnya, ketika pelaporan capaian kinerja triwulanan mengalami keterlambatan, hal ini menghambat evaluasi kemajuan program dan penentuan langkah korektif yang diperlukan.

Tantangan kedua yang ditemukan adalah adanya perbedaan antara data dalam sistem E-SAKIP dengan data yang dihimpun secara manual oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Inkonsistensi ini sering disebabkan oleh keterlambatan sinkronisasi data antar unit kerja, terutama antara OPD yang memiliki standar pencatatan dan format pelaporan yang berbeda. Perbedaan data ini dapat menimbulkan kebingungan bagi para pengambil keputusan dan berpotensi mempengaruhi akurasi evaluasi kinerja secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, perbedaan signifikan antara laporan elektronik dan manual mengharuskan dilakukannya verifikasi tambahan

yang memakan waktu dan sumber daya.

c. Kelengkapan

Kelengkapan informasi pada sistem E-SAKIP mendapat penilaian yang beragam. Sebanyak 62% responden menilai bahwa sistem telah menyediakan informasi yang cukup lengkap untuk kebutuhan pelaporan dasar, namun 38% lainnya merasa masih ada indikator kinerja penting yang belum terakomodasi dalam sistem.

Aspek ketiga yang menjadi sorotan adalah tingkat detail data yang masih perlu ditingkatkan. Meskipun informasi yang tersedia dalam E-SAKIP dinilai cukup lengkap untuk kebutuhan pelaporan dasar, beberapa responden mengidentifikasi kebutuhan akan parameter evaluasi kinerja yang lebih spesifik dan terperinci. Data yang ada saat ini cenderung bersifat umum dan belum sepenuhnya mendukung analisis mendalam yang diperlukan oleh pimpinan daerah untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan strategis. Permasalahan keempat yang terungkap dari hasil survei adalah kesulitan dalam menelusuri laporan kinerja dari periode sebelumnya. Beberapa pegawai melaporkan bahwa sistem E-SAKIP belum dilengkapi dengan fitur pencarian yang efisien dan efektif untuk menemukan data historis. Keterbatasan ini menyulitkan proses evaluasi dan perbandingan kinerja antar tahun, yang sangat penting untuk mengidentifikasi tren jangka panjang dan mengukur kemajuan program yang berkelanjutan. Tanpa kemampuan untuk mengakses dan menganalisis data historis dengan mudah, potensi sistem sebagai alat untuk pembelajaran organisasional tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

3. Kualitas Layanan (Service Quality)

Kualitas layanan dalam sistem E-SAKIP menjadi aspek penting yang menentukan efektivitas dan efisiensi penggunaan sistem dalam mendukung pengelolaan kinerja pemerintahan daerah. Layanan yang berkualitas tidak hanya mencakup ketersediaan sistem yang stabil, tetapi juga mencerminkan bagaimana dukungan teknis diberikan kepada pengguna. Beberapa faktor utama yang menjadi indikator dalam kualitas layanan ini meliputi kecepatan respons terhadap permasalahan teknis, keandalan solusi yang diberikan, serta adanya bantuan teknis yang memadai bagi pegawai yang menggunakan sistem. Selain itu, aspek pelatihan dan pendampingan juga menjadi faktor krusial dalam memastikan bahwa seluruh pegawai yang berinteraksi dengan sistem dapat memahami dan memanfaatkan fitur-fiturnya secara optimal tanpa mengalami kesulitan yang berarti. Untuk mencapai standar layanan yang optimal, E-SAKIP perlu menyediakan dokumentasi yang jelas, mekanisme bantuan yang cepat, serta sistem pendampingan yang berkelanjutan agar pengguna dapat menyelesaikan permasalahan teknis dengan lebih mandiri.

a. Responsivitas

Responsivitas layanan dukungan teknis E-SAKIP mendapat penilaian beragam dari para pengguna. Data menunjukkan bahwa rata-rata waktu respons terhadap laporan gangguan adalah 6 jam kerja, dengan variasi antara 2-24 jam tergantung kompleksitas masalah dan ketersediaan tim teknis. Kualitas layanan merupakan aspek fundamental dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara Elektronik (E-SAKIP) yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penggunaan sistem secara keseluruhan. Layanan yang berkualitas tidak hanya menjamin kelancaran operasional sistem, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap tingkat kepuasan dan produktivitas para pengguna dalam melaksanakan tugas mereka. Dalam konteks penerapan E-SAKIP di Kabupaten Sumba Tengah, aspek kualitas layanan menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan implementasi sistem informasi tersebut. Dukungan teknis yang memadai, kecepatan respons terhadap permasalahan, serta ketersediaan bantuan teknis yang terstruktur menjadi elemen kunci dalam memastikan bahwa sistem dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pengguna tanpa mengalami hambatan yang berarti.

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui kuisioner yang telah disebarkan kepada 47 responden dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sumba Tengah, ditemukan beberapa temuan yang menarik terkait dengan kualitas layanan E-SAKIP. Sebagian

besar responden memberikan apresiasi terhadap kecepatan respons tim teknis dalam menangani berbagai permasalahan yang muncul. Namun demikian, terdapat beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan kualitas layanan di masa mendatang.

b. Jaminan

Aspek jaminan dalam kualitas layanan mencakup kepastian bahwa masalah teknis dapat diselesaikan dengan tuntas. Sebanyak 55% responden menyatakan bahwa solusi yang diberikan oleh tim teknis sering bersifat sementara dan masalah yang sama dapat muncul kembali di kemudian hari.

c. Empati

Dimensi empati dalam kualitas layanan menyoroti kemampuan tim pendukung untuk memahami kesulitan pengguna. Sebanyak 72% responden merasa bahwa tim IT support memiliki empati yang baik dan berupaya membantu meskipun dengan keterbatasan sumber daya.

Aspek lain yang tidak kalah penting dalam kualitas layanan E-SAKIP adalah ketersediaan pelatihan lanjutan dan pendampingan bagi pengguna sistem. Secara keseluruhan, kualitas layanan E-SAKIP di Kabupaten Sumba Tengah menunjukkan adanya upaya yang baik dalam memberikan dukungan kepada pengguna, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Responsivitas tim teknis mendapat apresiasi dari mayoritas pengguna meskipun masih terbatas oleh jumlah personil yang tidak sebanding dengan jumlah OPD yang dilayani. Aspek jaminan masih menjadi perhatian utama karena banyak solusi yang diberikan bersifat temporer dan tidak menyelesaikan akar permasalahan. Sementara itu, aspek empati mendapat penilaian positif dengan tim teknis yang dinilai memiliki kesediaan dan kesabaran dalam membantu pengguna.

4. Penggunaan (Use)

Penggunaan (Use) dalam E-SAKIP merupakan aspek krusial yang mengukur sejauh mana sistem ini benar-benar dimanfaatkan oleh pegawai pemerintahan daerah dalam berbagai aktivitas administratif dan operasional. E-SAKIP dirancang untuk membantu dalam penyusunan laporan kinerja, pemantauan capaian target, serta evaluasi kebijakan dan program kerja. Namun, efektivitas sistem ini dalam praktik sehari-hari masih dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, seperti tingkat kepercayaan pengguna terhadap keandalan sistem, kemudahan akses, serta dukungan pimpinan dalam mengarahkan pemanfaatan sistem secara optimal. Selain itu, ketersediaan data yang akurat dan real-time menjadi elemen kunci yang menentukan seberapa jauh E-SAKIP benar-benar dapat diandalkan dalam pengelolaan kinerja pemerintahan daerah.

a. Frekuensi Penggunaan

Frekuensi penggunaan E-SAKIP di Kabupaten Sumba Tengah menunjukkan pola yang beragam antar OPD. Data menunjukkan bahwa dari 485 pengguna terdaftar, hanya 325 pengguna (67%) yang aktif mengakses sistem secara rutin. OPD yang terkait langsung dengan perencanaan dan keuangan cenderung memiliki frekuensi penggunaan lebih tinggi dibandingkan OPD lainnya.

Berdasarkan hasil monitoring akses sistem selama 6 bulan terakhir, ditemukan bahwa pola penggunaan terpusat pada periode-periode tertentu, terutama menjelang batas waktu pelaporan. Grafik penggunaan menunjukkan lonjakan signifikan pada minggu terakhir setiap bulan, dan peningkatan dramatis pada akhir triwulan. Di luar periode tersebut, akses terhadap sistem cenderung minimal, yang mengindikasikan bahwa E-SAKIP lebih banyak dimanfaatkan sebagai alat pelaporan administratif daripada sistem monitoring berkelanjutan.

Fenomena ini menjelaskan bahwa meskipun secara kuantitas pengguna aktif cukup tinggi (67%), namun pola penggunaan masih bersifat periodik dan belum terintegrasi sepenuhnya dalam aktivitas sehari-hari organisasi. Hal ini turut dipengaruhi oleh budaya kerja yang masih berorientasi pada output administratif daripada outcome kinerja.

b. Pola Penggunaan

Berdasarkan analisis pola penggunaan E-SAKIP, ditemukan variasi signifikan dalam pemanfaatan fitur-fitur sistem. Hasil survei menunjukkan bahwa 85% pengguna lebih banyak mengakses fitur-fitur dasar seperti input data capaian dan pelaporan rutin. Sementara itu, fitur-

fitur lanjutan seperti analisis tren kinerja, visualisasi data, dan dashboard komparatif yang sebenarnya merupakan nilai tambah utama dari sistem ini jarang dimanfaatkan secara optimal.

Satu fenomena menarik yang terungkap dari penelitian ini adalah adanya dualisme penggunaan sistem. Sebanyak 52% responden mengaku masih melakukan pencatatan manual sebagai cadangan, meskipun data sudah diinput ke dalam E-SAKIP. Praktik ini menunjukkan adanya keraguan terhadap reliabilitas sistem di kalangan pengguna.

Pola penggunaan ini semakin menegaskan bahwa tantangan dalam implementasi E-SAKIP tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek kepercayaan pengguna dan budaya organisasi yang perlu ditransformasi secara bertahap.

5. Kepuasan Pengguna (User Satisfaction)

Kepuasan pengguna merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas implementasi E-SAKIP, karena mencerminkan tingkat kenyamanan, penerimaan, serta pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan sistem ini. Tingkat kepuasan pengguna dapat mempengaruhi seberapa optimal sistem digunakan dalam mendukung berbagai aktivitas administratif, seperti penyusunan laporan kinerja, pemantauan capaian target, serta evaluasi kebijakan dan program kerja. Jika pengguna merasa nyaman dan sistem dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan baik, maka efektivitas E-SAKIP dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintahan akan semakin optimal. Namun, sebaliknya, jika pengguna merasa kesulitan dalam mengoperasikan sistem atau mengalami berbagai kendala teknis, maka pemanfaatan E-SAKIP bisa berkurang dan sistem tidak akan memberikan dampak yang maksimal.

a. Kepuasan Umum

Tingkat kepuasan umum pengguna terhadap sistem E-SAKIP menunjukkan hasil yang moderat. Dari 32 admin E-SAKIP yang disurvei, sebanyak 65% menyatakan cukup puas dengan sistem secara keseluruhan, 25% menyatakan kurang puas, dan 10% sangat puas. Persentase ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas pengguna merasakan manfaat dari implementasi E-SAKIP, masih terdapat ruang yang cukup besar untuk peningkatan sistem.

Beberapa elemen utama yang mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna mencakup kestabilan sistem, kemudahan penggunaan, serta kualitas dan kecepatan layanan dukungan teknis. Pengguna yang memberikan penilaian positif umumnya mengapresiasi standarisasi format pelaporan dan kemudahan dalam melacak capaian kinerja. Sementara itu, pengguna yang kurang puas menyoroti masalah seperti lambatnya akses sistem pada jam sibuk, kesulitan dalam menemukan fitur tertentu, dan respon terhadap gangguan teknis yang memakan waktu lama.

Tantangan lain yang mempengaruhi kepuasan pengguna adalah ekspektasi yang berbeda antar level organisasi. Pimpinan dan pengambil kebijakan cenderung memprioritaskan aspek pelaporan dan fitur monitoring, sementara staf pelaksana lebih memperhatikan kemudahan input data dan stabilitas sistem. Perbedaan ekspektasi ini memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam pengembangan dan penyempurnaan sistem.

b. Pengalaman Pengguna

Pengalaman pengguna (user experience) menjadi dimensi yang sangat penting dalam menilai kepuasan terhadap E-SAKIP. Berdasarkan hasil survei, 58% responden menilai bahwa desain antarmuka sistem masih perlu disederhanakan untuk memudahkan pengguna. Beberapa kritik utama meliputi tata letak menu yang kurang intuitif, alur navigasi yang membingungkan, serta tampilan yang kurang responsif saat diakses dari perangkat yang berbeda.

Adapun beberapa pengguna menyoroti perlunya peningkatan pada aspek kompatibilitas dengan berbagai perangkat. Dengan meningkatnya penggunaan perangkat mobile dalam lingkungan kerja modern, kemampuan E-SAKIP untuk berfungsi optimal pada berbagai ukuran layar menjadi semakin penting.

Aspek lain yang menjadi perhatian adalah kapasitas untuk menyesuaikan tampilan dan laporan sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing OPD. Sebanyak 62% responden menyatakan bahwa fitur kustomisasi yang lebih fleksibel akan sangat membantu dalam mengoptimalkan penggunaan sistem.

6. Manfaat Bersih (Net Benefits)

Manfaat bersih atau net benefits dari implementasi E-SAKIP mencerminkan dampak menyeluruh dari sistem ini terhadap peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. Penerapan E-SAKIP bertujuan untuk mempermudah proses administrasi dengan mengotomatiskan penyusunan laporan kinerja, meningkatkan pemantauan capaian target, serta menyediakan data real-time yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dengan sistem ini, proses pelaporan yang sebelumnya dilakukan secara manual dan cenderung rentan terhadap kesalahan administratif dapat diminimalkan. Selain itu, penerapan teknologi dalam pengelolaan kinerja pemerintahan juga membantu mengurangi risiko manipulasi data serta meningkatkan akuntabilitas publik. Manfaat lain yang dirasakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) adalah kemudahan dalam mengakses informasi terkait evaluasi kinerja, sehingga dapat dijadikan dasar dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan yang lebih baik.

a. Efektivitas Organisasi

Implementasi E-SAKIP telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan efektivitas organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan skor SAKIP dari 52,45 pada tahun 2020 menjadi 60,12 pada tahun 2023, yang berarti terjadi kenaikan dari kategori CC (Cukup) menjadi kategori B (Baik). Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pengelolaan kinerja pemerintahan daerah, meskipun masih terdapat berbagai aspek yang perlu ditingkatkan.

Secara substantif, E-SAKIP telah membantu menstandardisasi proses perencanaan dan pelaporan kinerja antar OPD. Standardisasi ini mempermudah proses evaluasi dan koordinasi antar unit kerja, sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk memiliki perspektif yang lebih terintegrasi terhadap capaian kinerja secara keseluruhan. Selain itu, format pelaporan elektronik memudahkan proses rekonsiliasi data dan validasi informasi, yang berdampak pada peningkatan kualitas laporan kinerja yang dihasilkan.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa peningkatan skor administratif ini sejalan dengan perbaikan kinerja riil di lapangan. Beberapa pejabat masih mempersepsikan E-SAKIP sebagai instrumen administratif semata, belum sepenuhnya menjadikannya sebagai alat manajemen kinerja yang terintegrasi dalam pengambilan

Tantangan lain yang teridentifikasi adalah kesiapan budaya organisasi dalam mengadopsi pendekatan berbasis data dalam pengambilan keputusan. Transformasi dari model tradisional ke model digital membutuhkan perubahan pola pikir dan cara kerja yang tidak selalu mudah diadaptasi oleh seluruh elemen organisasi.

b. Efisiensi

Dalam aspek efisiensi, penerapan E-SAKIP telah membawa sejumlah perbaikan yang signifikan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya pengurangan waktu penyusunan laporan kinerja hingga 40% dibandingkan dengan metode manual sebelumnya. Standardisasi format dan otomatisasi beberapa proses perhitungan telah memangkas tahapan administratif yang sebelumnya memakan banyak waktu.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam aspek efisiensi, seperti tingkat penyerapan anggaran yang masih rata-rata 75% dan keterlambatan pelaporan triwulan yang masih terjadi dengan rata-rata 15 hari dari tenggat waktu yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa efisiensi administratif belum sepenuhnya berdampak pada efisiensi operasional secara keseluruhan.

Tantangan efisiensi juga terkait dengan adanya dualisme sistem, di mana penggunaan E-SAKIP masih dibarengi dengan pencatatan manual yang redudansi. Hal ini menciptakan beban kerja tambahan dan mengurangi efisiensi yang seharusnya diperoleh dari digitalisasi proses.

c. Transparansi

Dalam hal transparansi, implementasi E-SAKIP telah membawa kemajuan yang cukup berarti. Sistem ini memungkinkan visualisasi dan pemantauan capaian kinerja secara lebih terbuka, baik oleh pimpinan daerah maupun oleh pengawas internal. Dengan adanya dashboard

dan laporan terstruktur, akses terhadap informasi kinerja menjadi lebih mudah dan cepat.

Namun, transparansi eksternal kepada masyarakat masih menjadi area yang perlu ditingkatkan. Saat ini, belum terdapat portal publik yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan memantau capaian kinerja pemerintah daerah secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi yang dihasilkan oleh E-SAKIP masih sebatas untuk kepentingan internal pemerintahan.

Aspek transparansi ini semakin krusial mengingat adanya ekspektasi yang semakin tinggi dari masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik. E-SAKIP memiliki potensi untuk menjadi instrumen yang tidak hanya meningkatkan akuntabilitas internal, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat melalui transparansi yang lebih luas.

3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Implementasi E-SAKIP di Kabupaten Sumba Tengah

1. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam mengoperasikan E-SAKIP menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi sistem ini. E-SAKIP sebagai sistem berbasis digital yang digunakan untuk menyusun laporan serta memantau capaian kinerja memerlukan pemahaman teknis yang memadai dari para pegawai yang bertugas. Secara umum, sebagian besar pegawai telah menggunakan E-SAKIP dalam melaksanakan tugas mereka, baik dalam menyusun laporan kinerja maupun dalam melakukan pemantauan terhadap pencapaian indikator yang telah ditetapkan. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan kendala yang berkaitan dengan pemahaman teknis terhadap berbagai fitur yang tersedia dalam sistem ini. Beberapa pegawai merasa bahwa meskipun mereka telah familiar dengan sistem, masih terdapat aspek-aspek tertentu yang membingungkan dan sulit dioperasikan secara optimal.

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya pelatihan teknis yang mendalam mengenai fitur-fitur spesifik dalam E-SAKIP. Hal ini menyebabkan pegawai hanya mampu menggunakan fitur dasar tanpa dapat mengeksplorasi dan memanfaatkan seluruh potensi sistem. Kurangnya pemahaman ini berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan sistem karena pemanfaatannya tidak maksimal. Dalam beberapa kasus, pegawai mengalami kesulitan dalam menginput data, melakukan analisis capaian kinerja, atau mengakses laporan yang telah tersimpan dalam sistem. Kesulitan ini menunjukkan bahwa masih diperlukan penguatan kompetensi SDM melalui pelatihan lanjutan yang lebih terstruktur dan mendalam agar setiap pegawai mampu memahami dan mengoperasikan E-SAKIP dengan optimal.Dengan demikian, kesiapan SDM dalam penggunaan E-SAKIP tidak hanya bergantung pada pengalaman dalam menggunakan sistem, tetapi juga pada tingkat pemahaman dan kompetensi teknis yang dimiliki oleh masing-masing pegawai. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kapasitas pegawai melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan menjadi langkah yang sangat penting dalam memastikan bahwa E-SAKIP dapat diterapkan dengan efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi instansi pemerintahan.

2. Infrastruktur Teknologi dan Ketersediaan Jaringan

Sarana yang mendukung ikut menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab aparatur dalam bekerja (Amalia & Arafah, 2021). Infrastruktur teknologi dan ketersediaan jaringan menjadi faktor krusial dalam keberhasilan implementasi E-SAKIP. Sistem ini mengandalkan teknologi digital untuk menyusun laporan serta memantau capaian kinerja, sehingga kualitas koneksi internet dan perangkat yang digunakan sangat mempengaruhi efektivitas operasionalnya. Dalam praktiknya, ketersediaan jaringan yang stabil serta perangkat komputer yang memadai menjadi kebutuhan utama agar proses input, pengolahan, dan analisis data dapat berjalan tanpa kendala. Namun, kenyataannya masih banyak hambatan yang dihadapi, terutama dalam hal gangguan jaringan yang sering terjadi.

Gangguan jaringan ini berdampak signifikan terhadap kelancaran penggunaan E-SAKIP. Ketika jaringan tidak stabil atau mengalami gangguan, proses pengunggahan laporan menjadi terhambat, bahkan dalam beberapa kasus, sistem tidak dapat diakses sama sekali. Akibatnya, pegawai mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka secara tepat waktu. Hal ini

berpotensi menurunkan efisiensi kerja serta menghambat proses evaluasi kinerja yang dilakukan melalui sistem. Dalam beberapa kasus, permasalahan ini juga menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian laporan kinerja, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas pengambilan keputusan di instansi terkait. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi. Pemerintah perlu memastikan bahwa jaringan internet yang digunakan memiliki kapasitas yang memadai dan stabil di seluruh unit kerja yang menggunakan E-SAKIP. Selain itu, penyediaan perangkat komputer yang sesuai dengan spesifikasi sistem juga menjadi aspek penting agar pengguna dapat mengakses dan mengoperasikan E-SAKIP tanpa hambatan teknis. Pemeliharaan jaringan yang rutin, peningkatan kapasitas server, serta adanya tim teknis yang siap memberikan bantuan jika terjadi gangguan juga menjadi solusi yang dapat diterapkan untuk memastikan kelancaran sistem. Hal tersebut juga sejalan dengan hambatan yang ditemukan dalam penelitian Busiri & Junianto (2023) yang menemukan ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai masih menjadi faktor penghambat kinerja aparatur sipil negara dalam penerapan SPBE di lingkup BKPSDM Kabupaten Bandung Barat

Dengan demikian, keberhasilan implementasi E-SAKIP tidak hanya bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem, tetapi juga pada ketersediaan infrastruktur teknologi yang mendukung. Tanpa jaringan yang stabil dan perangkat yang memadai, efektivitas sistem ini akan terganggu, sehingga tujuan utama dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan tidak dapat tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur teknologi menjadi hal yang sangat penting dalam memastikan bahwa E-SAKIP dapat berfungsi dengan optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi instansi pemerintahan.

3. Kualitas Layanan dan Dukungan Teknis

Kualitas layanan dan dukungan teknis dalam implementasi E-SAKIP memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan kelancaran operasional sistem. Sebagai platform digital yang digunakan dalam proses penyusunan laporan dan pemantauan kinerja instansi pemerintahan, E-SAKIP sering kali menghadapi berbagai kendala teknis yang memerlukan respons cepat dari tim pendukung teknis. Sejauh ini, tim pendukung teknis dinilai cukup responsif dalam menangani permasalahan yang dihadapi pegawai. Ketika ada gangguan atau kendala dalam sistem, pegawai dapat segera menghubungi tim teknis untuk mendapatkan bantuan. Namun, meskipun respons yang diberikan tergolong cepat, efektivitas solusi yang dit arkan masih menjadi perhatian.

Salah satu kritik utama yang disampaikan oleh pengguna adalah bahwa solusi yang diberikan oleh tim teknis sering kali hanya bersifat sementara, tanpa memberikan pemahaman mendalam kepada pegawai mengenai penyebab permasalahan dan cara mengatasinya secara mandiri. Dalam banyak kasus, pegawai harus menghubungi tim teknis berulang kali untuk permasalahan yang sama, karena mereka tidak diberikan pelatihan yang cukup untuk menangani kendala tersebut secara langsung. Hal ini tentu berdampak pada efisiensi kerja, karena pegawai menjadi sangat bergantung pada bantuan teknis, bahkan untuk permasalahan yang sebenarnya bisa diatasi sendiri jika diberikan pemahaman yang lebih baik.Oleh karena itu, diperlukan pelatihan yang lebih komprehensif agar pengguna dapat memahami cara kerja sistem secara lebih mendalam dan mampu menyelesaikan kendala teknis secara mandiri tanpa harus selalu bergantung pada tim pendukung teknis. Untuk meningkatkan kualitas layanan dan dukungan teknis E-SAKIP, beberapa langkah perbaikan dapat dilakukan. Pertama, pelatihan teknis yang lebih komprehensif harus diselenggarakan secara berkala agar pegawai memiliki pemahaman yang lebih baik tentang sistem. Pelatihan ini tidak hanya berfokus pada penggunaan dasar E-SAKIP, tetapi juga mencakup cara mengatasi permasalahan teknis yang umum terjadi. Kedua, tim pendukung teknis perlu mengembangkan dokumentasi panduan yang lengkap dan mudah dipahami, sehingga pegawai dapat merujuk ke panduan tersebut sebelum menghubungi tim teknis. Ketiga, evaluasi berkala terhadap efektivitas dukungan teknis perlu dilakukan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan tidak hanya cepat tetapi juga mampu memberikan solusi yang bersifat jangka panjang.

Dengan adanya peningkatan dalam kualitas layanan dan dukungan teknis, implementasi E-

SAKIP dapat berjalan lebih optimal. Pegawai akan memiliki tingkat kemandirian yang lebih tinggi dalam mengoperasikan sistem, sementara tim teknis dapat lebih fokus dalam menangani permasalahan yang lebih kompleks. Dengan demikian, E-SAKIP tidak hanya menjadi alat pemantauan dan pelaporan kinerja yang efektif, tetapi juga dapat digunakan secara efisien tanpa hambatan teknis yang berulang.

4. Regulasi dan Kebijakan Internal

Regulasi dan kebijakan internal merupakan elemen penting dalam mendukung keberhasilan implementasi sistem E-SAKIP di lingkungan pemerintahan daerah. Sebagai sistem digital yang dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, E-SAKIP membutuhkan dasar hukum yang kuat agar dapat diterapkan secara konsisten dan efektif. Regulasi yang jelas dan terperinci mengenai kewajiban penggunaan sistem ini akan memastikan bahwa setiap pegawai memahami pentingnya beradaptasi dengan digitalisasi serta mematuhi standar yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menciptakan kebijakan yang mendukung implementasi E-SAKIP, termasuk dalam hal pemberian sanksi bagi pegawai yang masih enggan beralih dari metode konvensional ke sistem digital. Meskipun penggunaan E-SAKIP sudah diwajibkan, masih ditemukan sejumlah pegawai yang lebih nyaman menggunakan metode pencatatan manual karena belum terbiasa dengan sistem ini. Sikap ini dapat menghambat efektivitas sistem secara keseluruhan, terutama dalam proses integrasi dan pengolahan data kinerja yang membutuhkan konsistensi dalam penggunaannya. Tanpa regulasi yang lebih tegas, kepatuhan pegawai terhadap sistem ini mungkin akan terus mengalami kendala, sehingga manfaat penuh dari digitalisasi akuntabilitas kinerja tidak dapat dicapai secara maksimal.

Sebagaimana disampaikan dalam tanggapan umum responden, banyak pegawai yang memahami bahwa penggunaan E-SAKIP adalah kewajiban, tetapi masih ada beberapa rekan kerja mereka yang belum sepenuhnya beradaptasi. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada saat ini belum cukup kuat untuk memastikan seluruh pegawai memanfaatkan sistem ini secara optimal. Dalam beberapa kasus, kebijakan internal masih memberikan kelonggaran bagi pegawai untuk tetap menggunakan pencatatan manual, yang pada akhirnya dapat menghambat proses pengolahan dan pelaporan data secara digital. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang lebih ketat dan bersifat mengikat agar seluruh pegawai tanpa pengecualian menggunakan E-SAKIP sebagai satu-satunya metode pencatatan dan pelaporan kinerja.

Selain pengetatan regulasi, pemerintah daerah juga perlu mengadopsi strategi lain untuk meningkatkan kepatuhan pegawai dalam menggunakan E-SAKIP. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memberikan pelatihan yang lebih intensif bagi pegawai yang masih merasa kesulitan dalam mengoperasikan sistem ini. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan resistensi terhadap perubahan dapat diminimalkan, sehingga seluruh pegawai dapat beradaptasi dengan lebih cepat. Selain itu, pemberian insentif bagi pegawai yang aktif memanfaatkan sistem ini dengan baik juga bisa menjadi motivasi tambahan untuk meningkatkan kepatuhan. Pada akhirnya, keberhasilan E-SAKIP tidak hanya bergantung pada kesiapan teknis dan sumber daya manusia, tetapi juga pada kebijakan internal yang mampu memastikan seluruh pegawai mematuhi sistem ini secara disiplin. Regulasi yang lebih ketat, didukung oleh pendekatan edukatif yang komprehensif, akan membantu menciptakan budaya kerja yang lebih adaptif terhadap teknologi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Dengan demikian, E-SAKIP dapat berfungsi sebagai alat yang benar-benar efektif dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pemerintahan daerah.

5. Kepuasan Pengguna dan Kemudahan Penggunaan

Kepuasan pengguna dan kemudahan penggunaan merupakan aspek krusial dalam keberhasilan implementasi sistem E-SAKIP di lingkungan pemerintahan. Meskipun sistem ini telah membantu mayoritas pegawai dalam menyusun laporan dan memantau capaian kinerja, masih terdapat berbagai aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Salah satu keluhan utama yang sering muncul adalah terkait tampilan antarmuka sistem yang dianggap kurang ramah pengguna. Pegawai merasa bahwa beberapa fitur sulit ditemukan,

sehingga mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk mengakses informasi atau melakukan input data yang diperlukan.

Selain itu, kecepatan akses sistem juga menjadi salah satu kendala yang sering dikeluhkan. Dalam kondisi tertentu, E-SAKIP mengalami kelambatan dalam memproses data, terutama saat banyak pegawai menggunakannya secara bersamaan. Hal ini dapat menghambat efektivitas kerja, terutama bagi pegawai yang memiliki batas waktu ketat dalam menyusun laporan kinerja. Ketika sistem berjalan lambat atau mengalami gangguan teknis, pegawai harus menunggu lebih lama atau mencari alternatif lain, yang pada akhirnya dapat mengurangi efisiensi kerja dan meningkatkan beban kerja administratif. E-SAKIP memang sangat membantu dalam proses penyusunan laporan, tetapi tampilan antarmukanya masih perlu diperbaiki agar lebih mudah digunakan. Responden juga menyoroti bahwa sering kali diperlukan waktu yang cukup lama untuk menemukan fitur tertentu yang dibutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa desain sistem belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pengguna secara optimal. Sebagai sistem yang digunakan secara luas oleh berbagai pegawai dengan tingkat pemahaman teknologi yang berbeda-beda, E-SAKIP seharusnya memiliki antarmuka yang lebih intuitif dan navigasi yang lebih sederhana agar dapat diakses dengan mudah oleh semua pengguna.

Untuk meningkatkan kepuasan pengguna, beberapa langkah perbaikan dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan evaluasi terhadap desain antarmuka E-SAKIP agar lebih user-friendly, dengan tata letak yang lebih sederhana dan fitur yang lebih mudah diakses. Desain yang intuitif akan membantu pegawai menemukan fungsi yang dibutuhkan tanpa harus menghabiskan banyak waktu untuk mencarinya. Kedua, peningkatan performa sistem juga menjadi hal yang penting agar proses input dan akses data dapat berjalan lebih cepat dan stabil. Optimalisasi server dan infrastruktur jaringan perlu dilakukan untuk menghindari kelambatan akses yang sering terjadi saat lalu lintas pengguna tinggi.

Selain itu, pihak pengembang juga dapat mengadopsi pendekatan berbasis umpan balik dari pengguna dengan secara rutin mengadakan survei kepuasan pengguna atau forum diskusi untuk memahami lebih lanjut kendala yang mereka hadapi. Dengan adanya keterlibatan aktif dari pegawai sebagai pengguna utama, pengembangan sistem dapat lebih sesuai dengan kebutuhan lapangan. Pelatihan berkala juga bisa menjadi solusi tambahan untuk memastikan bahwa pegawai memahami cara kerja sistem secara efektif dan dapat menggunakan fitur-fitur yang tersedia dengan optimal.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi E-SAKIP di Kabupaten Sumba Tengah belum berjalan secara optimal dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini tercermin dari masih rendahnya integrasi antara perencanaan strategis dan pelaporan kinerja, keterlambatan pelaporan triwulanan, tingginya tingkat kesalahan input data, dan ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi program. Selain itu, terdapat persoalan struktural seperti keterbatasan infrastruktur jaringan internet, kurangnya tenaga teknis, serta rendahnya kompetensi SDM dalam pengoperasian sistem E-SAKIP.

Jika dibandingkan dengan penelitian Setiawan dan Reviandani (2024) di DPMPTSP Kota Surabaya, perbedaan kontekstual sangat menonjol. Kota Surabaya memiliki infrastruktur digital dan SDM yang lebih memadai sehingga penerapan E-SAKIP cenderung efektif dan menghasilkan perbaikan signifikan dalam transparansi dan efisiensi layanan publik. Sementara di Kabupaten Sumba Tengah, hambatan seperti rasio staf IT yang hanya 2 untuk 32 OPD serta downtime sistem 4 jam per minggu menunjukkan bahwa faktor pendukung teknis dan organisasi belum memadai. Perbandingan ini menunjukkan bahwa keberhasilan E-SAKIP sangat dipengaruhi oleh kapasitas lokal.

Selanjutnya, penelitian Sofyan (2025) yang dilakukan di Sekretariat Jenderal DPD RI menunjukkan hasil yang positif dalam peningkatan skor SAKIP, karena adanya dukungan regulasi kuat dan kontrol internal yang ketat. Namun, kondisi tersebut tidak sepenuhnya relevan dengan konteks Kabupaten Sumba Tengah yang merupakan daerah otonom dengan keterbatasan sumber daya dan pengawasan yang lemah. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi E-SAKIP

memerlukan pendekatan yang adaptif terhadap karakteristik daerah, bukan hanya menekankan pada kelengkapan regulasi.

Hasil penelitian ini juga berbeda dengan temuan Monalisa et al. (2022) di Kabupaten Wajo yang menunjukkan efektivitas sistem SAKIP dalam memperkuat budaya kinerja. Di Kabupaten Sumba Tengah, budaya kinerja justru masih menjadi masalah, yang ditunjukkan dengan rendahnya indeks kepuasan masyarakat terhadap transparansi kinerja pemerintah sebesar 68,5 dari skala 100, serta adanya ketidaksesuaian format pelaporan sebanyak 42% dari total laporan yang harus dimodifikasi secara manual sebelum dikirim ke pusat.

Sementara itu, penelitian Rahma (2023) di Aceh juga mengindikasikan bahwa meskipun sistem SAKIP telah diterapkan, pemahaman ASN terhadap penggunaannya masih terbatas. Hasil tersebut senada dengan temuan penelitian ini, di mana hanya 45% operator yang memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan sistem E-SAKIP. Namun, penelitian ini menambahkan data yang lebih rinci dan teknis, seperti jumlah jam kerja yang hilang akibat kegagalan sistem (1.561,5 jam) dan tingkat efisiensi anggaran yang baru mencapai 18,7% dari target 35%, sehingga memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai dampak sistem yang belum optimal.

Terakhir, dibandingkan dengan penelitian Stefan et al. (2023) di Kabupaten Manggarai Timur yang juga berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, penelitian ini menyajikan temuan yang lebih mendalam dan kuantitatif mengenai hambatan dalam implementasi sistem E-SAKIP. Stefan dkk hanya menekankan aspek birokrasi dan koordinasi, sedangkan penelitian ini mencakup analisis teknis sistem, kondisi infrastruktur, kualitas data, hingga integrasi antar-OPD, sehingga dapat dijadikan landasan yang lebih kuat untuk perbaikan sistem di daerah dengan karakteristik serupa.

Secara keseluruhan, diskusi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi E-SAKIP tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem dan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas teknis, kesiapan SDM, kualitas infrastruktur digital, dan budaya kinerja yang mendukung. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang menyasar aspek-aspek struktural dan teknis, serta peningkatan literasi digital ASN guna mendorong akuntabilitas pemerintahan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang didapatkan penulis di lapangan selama masa penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi E-SAKIP di Kabupaten Sumba Tengah telah menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan akuntabilitas pemerintahan daerah, namun masih ada beberapa kendala teknis yang perlu diperbaiki. Kendala tersebut antara lain terkait dengan kualitas sistem, informasi, dan layanan, serta keterbatasan dalam pelatihan pengguna. Meskipun sistem E-SAKIP mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi penyusunan laporan kinerja, masalah seperti lambatnya pemrosesan data dan ketidaksesuaian antara data sistem dengan laporan manual menghambat optimalisasi penggunaan sistem ini.

Faktor pendukung dalam penerapan E-SAKIP meliputi komitmen pimpinan daerah, dukungan kebijakan internal, serta adanya sistem pelaporan terintegrasi. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang perencanaan dan pelaporan kinerja, kurangnya pelatihan teknis, serta rendahnya pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal di seluruh perangkat daerah.Solusi untuk meningkatkan efektivitas implementasi antara lain dengan memberikan pelatihan yang lebih komprehensif kepada pegawai, meningkatkan kualitas jaringan dan perangkat keras, serta memperkuat kebijakan yang mewajibkan penggunaan E-SAKIP. Dengan perbaikan pada aspek-aspek tersebut, E-SAKIP dapat lebih maksimal dalam mendukung akuntabilitas pemerintahan daerah di Kabupaten Sumba Tengah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada beberapa instansi pemerintahan saja di Kabupaten Sumba Tengah saja sebagai model studi kasus yang dipilih.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa

Efektivitas E- Sakip Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Sumba Tengah untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yangmembantu dan mensukseskan pelaksanaaa penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Amalia, R., & Arifah, S. B. N. (2021). Kompetensi Aparatur Dalam Upaya Melayani Perizinan Elektronik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah. Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur), 9(2), 71-88. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/494/

Busiri., & Junianto, D. J (2023) Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat. http://eprints.ipdn.ac.id/13471/

Creswell, J. W. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.). SAGE Publications.

DeLone, W. H., & McLean, E. R. (1992). Information systems success: The quest for the dependent variable. Information Systems Research, 3(1), 60–95. https://www.researchgate.net/publication/220079763_Information_Systems_Success_The_Quest_for_the_Dependent_Variable

Eaton, S. E., Stoesz, B. M., Crossman, K., Garwood, K., & McKenzie, A. (2022). Faculty perspectives of academic integrity during COVID-19: A mixed methods study of four Canadian universities. Canadian Journal of Higher Education, 52(3), 42–58. Retrieved from https://www.scopus.com/pages/publications/85148644054

Fatimah, Y. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan dalam Penelitian Sosial. Jakarta: Prenadamedia Group. https://doi.org/10.35870/ljit.v1i2.1684

Indrajit, R. E. (2022). E-government: Konsep, strategi, dan implementasi. Preinexus.

Inga-avila, M., et al (2025) Digital talent and job satisfaction in the administrative staff of a public university with WarpPLS 8.0 https://www.scopus.com/pages/publications/85212485227

Jacob, U. S., Fredrick, V. A., & Pillay, J. (2025). Aggressive behavior among individuals with intellectual disability: Predictive factor analysis. International Journal of Diversity in Education, 25(2), 1–21. Retrieved from https://www.scopus.com/pages/publications/85218859740

Moleong, L. J. (2015). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Monalisa, A. M., Madani, M., & Tahir, N. (2022). Efektivitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik, 3(4), 1173–1180. https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/8628

Neuman, W. (2017). Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif. Jakarta: PT Indeks.

Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metodologi penelitian sosial. Jakarta: Kencana.

Rahma, U. (2023). Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. [Skripsi, Universitas Islam Negeri https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34452/1/Ummur%20Rahma,%20190802052,%20FISIP,%20IAN.pdf

Setiawan, D. A., & Reviandani, O. (2024). Efektivitas E-SAKIP dalam meningkatkan akuntabilitas DPMPTSP Kota Surabaya. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 4(2), 416–422. https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i2.421

Simangunsong, F. (2017). Metode penelitian sosial kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers.

Sofyan, N. F. R. (2025). Efektivitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dalam meningkatkan kinerja dan skor SAKIP di Sekretariat Jenderal DPD RI. Neraca: Jurnal Akuntansi Terapan, 6(2), 39–49. https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JATIBARU/article/download/4660/2375

Stefan, P. N., Tinangon, J. J., & Afandi, D. (2023). Analisis implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur. Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, 1(1), 19–27. https://doi.org/10.58784/rapi.67

Sugiyono. (2016). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.